



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

## **BAB II PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGUNAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.563.231.800,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa;

### **Pasal 3**

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Maret 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Maret 2018

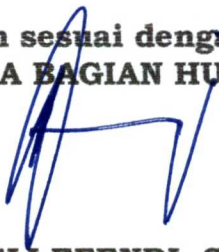
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**



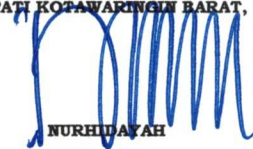
LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
<b>62.01.01</b>	<b>KECAMATAN KUMAI</b>				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	46.583.100,00	15.032.600,00	61.615.700,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulau	45.276.600,00	14.611.000,00	59.887.600,00	
62.01.01.2003	Sabuai	53.405.900,00	17.234.300,00	70.640.200,00	
62.01.01.2004	Kerava	52.984.900,00	17.098.500,00	70.083.400,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	59.071.900,00	19.062.800,00	78.134.700,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	59.795.200,00	19.296.200,00	79.091.400,00	
62.01.01.2007	Kubu	62.361.400,00	20.124.300,00	82.485.700,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	307.329.400,00	99.176.900,00	406.506.300,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	72.819.900,00	23.499.300,00	96.319.200,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	74.400.500,00	24.009.400,00	98.409.900,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	46.436.200,00	14.985.200,00	61.421.400,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	46.911.800,00	15.138.600,00	62.050.400,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	76.804.200,00	24.785.100,00	101.589.300,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	82.968.600,00	26.774.400,00	109.743.000,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	47.983.100,00	15.484.400,00	63.467.500,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.135.132.700,00</b>	<b>366.313.000,00</b>	<b>1.501.445.700,00</b>	
<b>62.01.02</b>	<b>KECAMATAN ARUT SELATAN</b>				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	50.456.600,00	16.282.600,00	66.739.200,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	644.119.000,00	207.860.900,00	851.979.900,00	
62.01.02.2010	Rangda	42.355.500,00	13.668.300,00	56.023.800,00	
62.01.02.2011	Kenambui	46.310.200,00	14.944.500,00	61.254.700,00	
62.01.02.2012	Runtu	49.708.300,00	16.041.100,00	65.749.400,00	
62.01.02.2013	Umpang	44.601.500,00	14.393.100,00	58.994.600,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	62.873.400,00	20.289.500,00	83.162.900,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	73.744.800,00	23.797.800,00	97.542.600,00	
62.01.02.2016	Natai Rava	64.448.900,00	20.798.000,00	85.246.900,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	98.470.100,00	31.776.800,00	130.246.900,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	55.152.800,00	17.798.100,00	72.950.900,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	55.853.300,00	18.024.100,00	73.877.400,00	
62.01.02.2020	Sulung	81.221.800,00	26.210.700,00	107.432.500,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.369.316.200,00</b>	<b>441.885.500,00</b>	<b>1.811.201.700,00</b>	
<b>62.01.03</b>	<b>KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA</b>				
62.01.03.2001	Babuai Baboti	49.258.700,00	15.896.000,00	65.154.700,00	
62.01.03.2002	Tempayang	49.707.500,00	16.040.800,00	65.748.300,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	50.398.200,00	16.263.700,00	66.661.900,00	
62.01.03.2004	Kinijil	47.803.300,00	15.426.400,00	63.229.700,00	
62.01.03.2005	Dawak	76.334.100,00	24.633.400,00	100.967.500,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	72.084.100,00	23.261.900,00	95.346.000,00	
62.01.03.2009	Lalang	44.132.500,00	14.247.000,00	58.379.500,00	
62.01.03.2010	Rungun	54.647.300,00	17.634.900,00	72.282.200,00	
62.01.03.2011	Kondang	44.470.000,00	14.350.700,00	58.820.700,00	
62.01.03.2012	Suka Java	71.226.400,00	22.985.100,00	94.211.500,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	70.963.000,00	22.900.100,00	93.863.100,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	57.318.200,00	18.496.900,00	75.815.100,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	66.477.300,00	21.452.500,00	87.929.800,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Java	61.648.500,00	19.894.300,00	81.542.800,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulva	58.905.500,00	19.009.100,00	77.914.600,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>875.374.600,00</b>	<b>282.492.800,00</b>	<b>1.157.867.400,00</b>	
<b>62.01.04</b>	<b>KECAMATAN ARUT UTARA</b>				
62.01.04.2001	Nanga Mua	45.594.900,00	14.713.700,00	60.308.600,00	
62.01.04.2003	Sukarami	42.355.500,00	13.668.300,00	56.023.800,00	
62.01.04.2004	Oandis	42.355.500,00	13.668.300,00	56.023.800,00	
62.01.04.2005	Kerabu	42.355.500,00	13.668.300,00	56.023.800,00	
62.01.04.2006	Sambi	45.987.000,00	14.840.200,00	60.827.200,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	46.275.100,00	14.933.200,00	61.208.300,00	
62.01.04.2008	Pandau	49.133.800,00	15.855.700,00	64.989.500,00	
62.01.04.2009	Riam	47.913.300,00	15.461.800,00	63.375.100,00	
62.01.04.2010	Panahan	48.355.200,00	15.604.500,00	63.959.700,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	42.355.500,00	13.668.300,00	56.023.800,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>452.681.300,00</b>	<b>146.082.300,00</b>	<b>598.763.600,00</b>	
<b>62.01.05</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN LADA</b>				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	73.245.300,00	23.636.600,00	96.881.900,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	147.008.700,00	47.440.500,00	194.449.200,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	80.102.900,00	25.849.600,00	105.952.500,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	53.440.300,00	17.245.400,00	70.685.700,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	120.371.400,00	38.844.500,00	159.215.900,00	
62.01.05.2006	Purbasari	76.920.200,00	24.822.500,00	101.742.700,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Java	61.258.800,00	19.768.500,00	81.027.300,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	47.919.700,00	15.463.900,00	63.383.600,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	54.759.000,00	17.671.000,00	72.430.000,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	84.411.000,00	27.239.800,00	111.650.800,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	93.924.000,00	30.309.700,00	124.233.700,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>893.361.300,00</b>	<b>288.292.000,00</b>	<b>1.181.653.300,00</b>	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
<b>62.01.06</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN BANTENG</b>				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	59.221.400,00	19.111.000,00	78.332.400,00	
62.01.06.2002	Mulva Jadi	44.582.500,00	14.387.000,00	58.969.500,00	
62.01.06.2003	Karang Mulva	88.484.800,00	28.554.500,00	117.039.300,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	55.437.400,00	17.889.900,00	73.327.300,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	63.979.900,00	20.646.600,00	84.626.500,00	
62.01.06.2006	Marga Mulva	62.447.300,00	20.152.000,00	82.599.300,00	
62.01.06.2007	Amin Java	78.091.100,00	25.200.400,00	103.291.500,00	
62.01.06.2008	Arga Mulva	66.054.600,00	21.316.100,00	87.370.700,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	56.541.000,00	18.246.100,00	74.787.100,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	59.966.000,00	19.351.300,00	79.317.300,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	61.406.000,00	19.816.000,00	81.222.000,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	53.448.600,00	17.248.100,00	70.696.700,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	49.302.800,00	15.910.200,00	65.213.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	42.564.700,00	13.735.800,00	56.300.500,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	49.206.100,00	15.879.000,00	65.085.100,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	42.520.300,00	13.721.500,00	56.241.800,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	58.879.400,00	19.000.700,00	77.880.100,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>992.133.900,00</b>	<b>320.166.200,00</b>	<b>1.312.300.100,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.718.000.000,00</b>	<b>1.845.231.800,00</b>	<b>7.563.231.800,00</b>	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH